

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Manajemen parkir di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Malang sesuai dengan fungsi manajemen yang dikemukakan oleh G.R Terry, yaitu meliputi :

- a) *Planning* (Tahap Perencanaan)

Tahap perencanaan dibutuhkan untuk menyusun agenda kegiatan yang akan dilaksanakan. Di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Malang agenda kegiatan yang dibuat untuk menciptakan pelayanan publik yang baik dibidang parkir yang pertama yaitu adanya kegiatan pembinaan dan sosialisasi, kedua kegiatan penertiban parkir dan yang ketiga kegiatan patroli atau pengawasan.

- b) *Organizing* (Tahap Pengorganisasian)

Tahap pengorganisasian dibuat untuk menentukan siapa saja yang terkait dalam pelaksanaan rencana kegiatan. Di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang terlibat dalam pelaksanaan agenda kegiatan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dibidang parkir yaitu, pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Malang baik dari UPTD ataupun Kantor Induk di Bidang Pemandu Moda dan Transportasi, dan bekerjasama dengan MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan

Kecamatan) yaitu pihak Kecamatan, pihak KAPOLSEK, pihak DANRAMIL, dan petugas parkir.

c) *Actuating* (Tahap Pengaruh dan Implementasi)

Tahap implementasi merupakan tahap pelaksanaan agenda kegiatan. Bersama MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melaksanakan agenda kegiatan. Kegiatan pembinaan dilakukan satu tahun sekali di seluruh wilayah UPTD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Malang. Pembinaan dilakukan agar petugas parkir lebih tau apa tugas dan kewajiban yang harus dijalankan serta pengaduan petugas parkir jika ada kendala di lapangan, sedangkan sosialisasi berbeda dengan pembinaan, sosialisasi dilakukan tidak terjadwal karena sosialisasi dilakukan jika ada perubahan peraturan. Kegiatan selanjutnya adalah penertiban petugas parkir, penertiban dilakukan satu tahun sekali secara menyeluruh ke titik parkir di Kabupaten Malang, kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah petugas parkir sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik serta agar Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Malang mengetahui kondisi di lapangan seperti apa, jika ada pelanggaran yang dilakukan petugas parkir maka pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika akan memprosesnya sesuai dengan peraturan yang ada. Kegiatan terakhir yaitu patroli pengawasan yang dilakukan secara intensif oleh pihak UPTD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Malang, kegiatan pengawasan

dilakukan bertujuan agar petugas parkir dapat selalu melaksanakan tugasnya dengan baik.

d) *Controlling* (Tahap Pengawasan)

Tahap pengawasan dilakukan oleh dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika agar mengetahui seberapa berhasilnya agenda kegiatan yang terlaksana dan agar Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengetahui apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan agenda kegiatan.

2. Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Malang dalam melaksanakan manajemen parkir dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang baik, sebagai berikut:

- a) Kendala Internal meliputi pengawasan dan pendanaan. Dalam pengawasan kendala yang terjadi bukan hanya dalam melakukan pengawasan terhadap petugas parkir tapi juga pengawasan pada pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, karena masih sering dijumpai petugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang bekerjasama dengan petugas parkir demi kepentingan pribadi. Kendala pendanaan dalam menyediakan fasilitas yang diberikan kepada petugas parkir dalam menunjang kinerja tidak sesuai dengan yang di anggarkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Malang maka dari itu petugas parkir harus berusaha melengkapi fasilitas untuk dirinya sendiri. Kendala pendanaan juga mengenai retribusi parkir karena di Kabupaten Malang masih menggunakan sistem 70:30 dan dalam

pelaksanaannya pun masih sering terjadi kebocoran sehingga Pendapatan Asli Daerah yang didapat dari retribusi parkir tidak maksimal.

- b) Kendala eksternal meliputi terbatasnya lahan dan kepemilikan lahan. Terbatasnya lahan merupakan masalah yang terjadi di kota/daerah yang padat penduduk, maka dari itu pemerintah harus dapat mengelolanya dengan sebaik mungkin dengan memperhatikan penggunaan jangka panjang. Kepemilikan lahan juga merupakan kendala eksternal yang terjadi di Kabupaten Malang untuk masalah peparkiran, karena masih saja ditemukan petugas parkir yang merasa lahan atau tanah tersebut merupakan tanah milik pribadi tapi mereka tidak dapat membuktikannya dengan sertipikat hak atas tanah sesuai dengan Undang Undang Pokok Agraria Pasal 20 ayat 1 tentang sertipikat hak milik merupakan surat tanda bukti hak atas tanah bagi pemegangnya untuk memiliki, menggunakan, mengambil dan memanfaatkan lahannya secara turun temurun. Petugas parkir yang tidak dapat membuktikan sertipikat hak atas tanah yang diakuinya akan diproses dengan hukum yang berlaku.

B. Saran.

1. Dalam melakukan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan, diharapkan petugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Malang dapat terus berinovatif memikirkan strategi-strategi baru dalam masalah peparkiran seperti menyediakan lahan parkir bertingkat

untuk titik parkir yang padat seperti di daerah pasar-pasar besar di Kabupaten Malang karena penyediaan lahan parkir bertingkat akan lebih efektif dalam memanfaatkan lahan. Serta parkir menggunakan durasi waktu, agar masyarakat dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan parkir menggunakan durasi waktu sangat lebih efektif dan sudah digunakan di negara-negara maju. strategi-strategi baru akan sangat dibutuhkan karena dituntut dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.

2. Dalam masalah retribusi parkir, pihak Pemerintah Kabupaten Malang diharapkan lebih tegas dalam mengatasi masalah tersebut, seperti dengan beratnya sanksi yang ada dan perubahan sistem retribusi parkir seperti pembagiannya menjadi 60:40 atau Pemerintah dapat menggaji petugas parkir sehingga retribusi parkir yang didapat sepenuhnya milik pemerintah.
3. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dari segi parkir, diharapkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Malang juga dapat meningkatkan kualitas kerjanya terutama dalam melaksanakan pengawasan baik terhadap petugas parkir atau petugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.